



MakeAGIF.com

KEBIJAKAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEBUMEN

**ARAHAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
SELAKU KETUA TKPK KABUPATEN KEBUMEN**



**KEBUMEN
SEMARAK**

Sejahtera, Mandiri, Berakhlak
Bersama Rakyat

Disampaikan pada :

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
di Kecamatan Sempor, Karanggayam, Karangsambung, Alian,
Sadang

DEFINISI UMUM KEMISKINAN

HAK-HAK DASAR



PANGAN



Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup



Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan



Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL

1. Strategi Intervensi
 - a. Induktif Approach" bukan "deduktif approach".
 - b. THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)
2. Sangat bersifat Humanis : sangat volatile/dinamis

KONSEP KEMISKINAN MAKRO

Konsep Kemiskinan Makro yang dipakai BPS (dan juga beberapa negara lain) adalah : ketidakmampuan seseorang dlm memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)



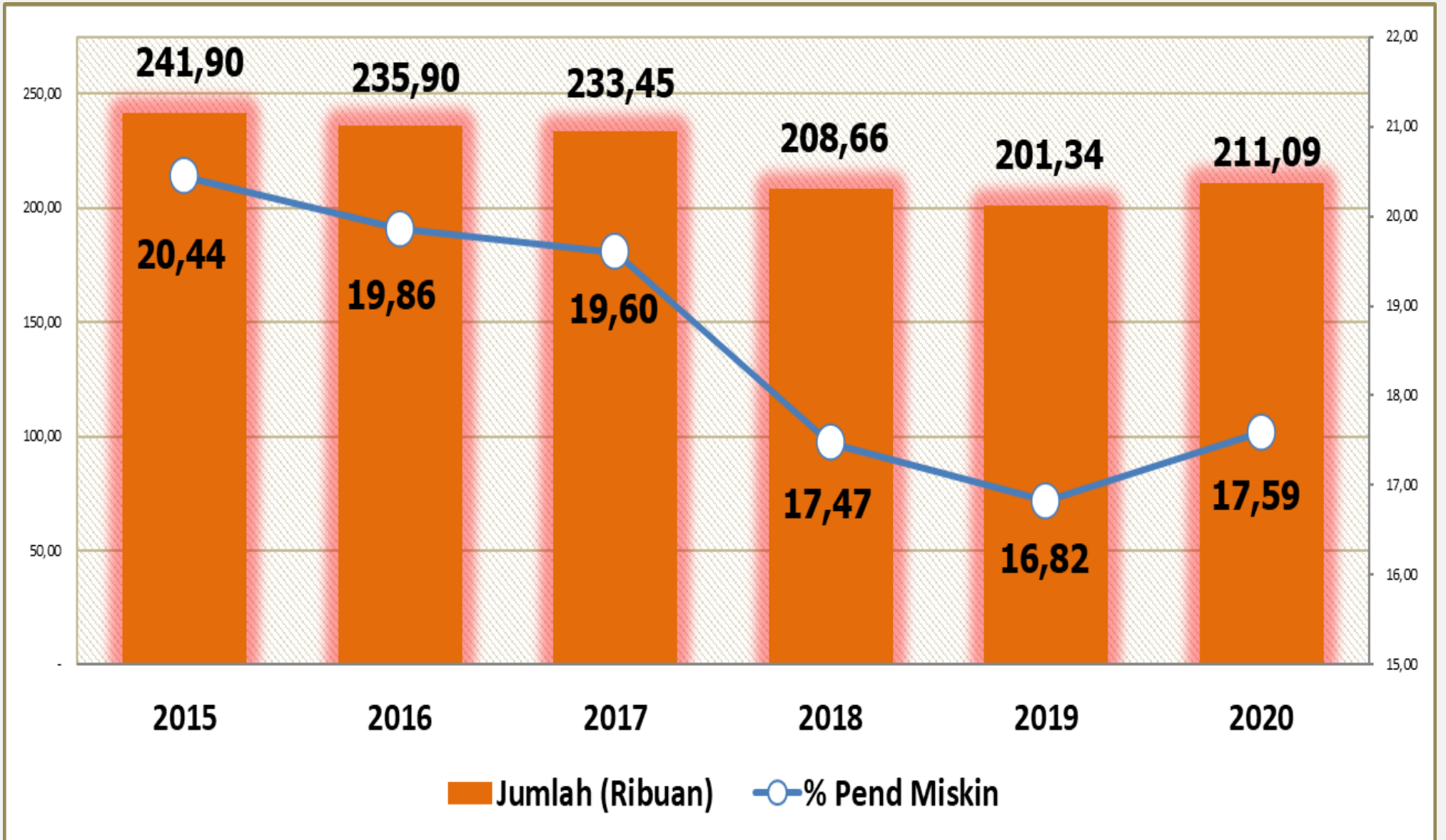
“ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar **makanan** dan **bukan makanan** (*diukur dari sisi pengeluaran*)”

PENDUDUK MISKIN

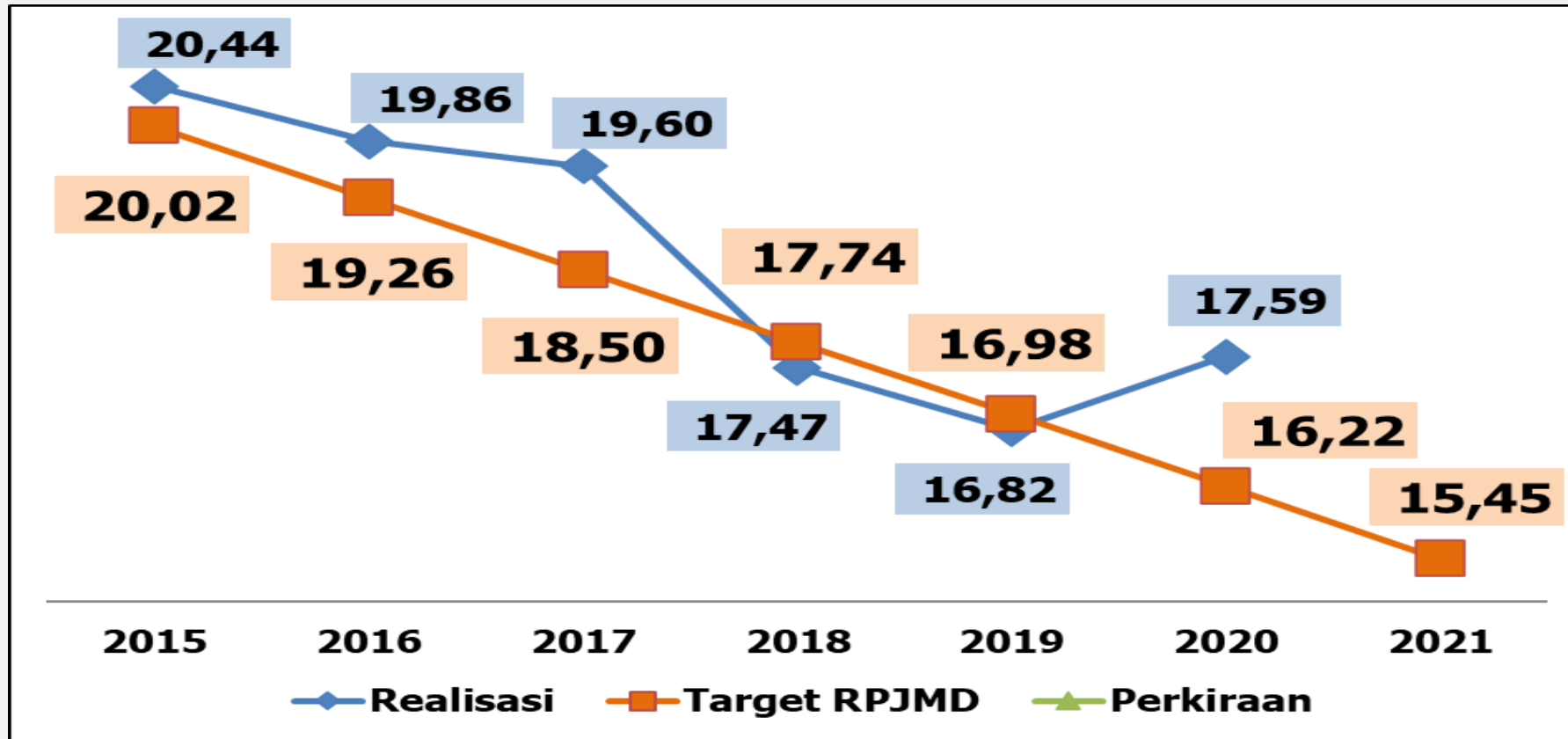
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah **GARIS KEMISKINAN**

GAMBARAN KEMISKINAN KEBUMEN

Selama Tahun 2015 sd 2020 angka kemiskinan turun 2,85% (0,57% per tahun) atau penduduk miskin turun berkurang sebesar 30.810 jiwa (6.160 jiwa per tahun)



TARGET DAN REALISASI RPJMD 2016-2021



Pada Tahun 2020 angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan termasuk di Kabupaten Kebumen menjadi 17,59 % karena terjadi pandemi covid - 19

ISU STRATEGIS KEMISKINAN DI KEBUMEN

1. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah
3. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.
4. Sinkronisasi, integrasi data kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran
5. Masih rendahnya mental dan pola pikir masyarakat miskin
6. Kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk belum optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan
7. Peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan dalam penanggulangan kemiskinan

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan **“Sinergitas Seluruh Stakeholder dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Optimalisasi Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal”**.

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem -setara dengan USD 1,9 PPP.

Tingkat kemiskinan ekstrem Tahun 2021 sebesar 4%

DASAR PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ESKTREM



01

Arahan Bapak Presiden RI pada Rapat Terbatas Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tanggal 21 Juli 2021 untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024

02

Indikator SDG's Nomor 1: Kemiskinan ekstrem hilang pada 2030

Arahan Presiden terkait Kemiskinan Ekstrem

Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, 4 Maret 2020

1. Agar **kemiskinan ekstrem** (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%.
2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa.
3. Validasi data agar mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*).
4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran.
5. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan **memutakhirkan DTKS**.

Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, 21 Juli 2021

1. Walaupun menghadapi pandemi, upaya Pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) **pada 2024 dapat mencapai 0%**.
2. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara **terintegrasi melalui kolaborasi intervensi**.
3. Pastikan intervensi di **sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih** dapat diterima.
4. **Pertajam basis data** untuk ketepatan target dan upaya percepatan.
5. **Libatkan sektor swasta** untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
6. Fokus pada 5 kabupaten/kota di 7 Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.



SIAPA WARGA MISKIN EKSTREM

1. Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan

- Warga miskin ekstrem yang sekaligus memiliki ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai

2. Warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup

- Warga miskin ekstrem produktif (usia 15-64 tahun), tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel

Kerangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



Kebijakan dan Strategi Pemerintah Pusat dan Daerah

Menurunkan Beban Pengeluaran

- Bantuan sosial dan subsidi
- Jaminan sosial (Jamsos)
- Jaring pengaman COVID-19

- Mengkonsolidasikan dan menyederhanakan program
- Meningkatkan cakupan dan manfaat
- Menyempurnakan ketepatan sasaran
- Menjaga kesejahteraan selama COVID-19

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Meningkatkan Pendapatan

- Pemberdayaan UMKM
- Pengembangan ekonomi lokal
 - Akses pekerjaan
- Respon kebijakan COVID-19

- Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
- Menciptakan nilai tambah dan pendapatan
- Mempertahankan UMK selama COVID-19

Data Terpadu Kegiatan Usaha (DTKU) - BPUM, BSU, RDKK

Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

- Meningkatkan akses terhadap layanan dasar
- Meningkatkan konektivitas antar wilayah

- Mendorong konvergensi anggaran
- Mendorong konsolidasi program
- Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan

Data Terpadu Wilayah Prioritas (*Geographical Targeting*)

35 Wilayah Prioritas Tahun 2021 (1)

No	Kode Kab/ Kota	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menurut Susenas		Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**			Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial						
								Program Sembako		Program Keluarga Harapan				
			Miskin Terbawah	Total	Miskin ekstrem	25% Penerima	ekstrem	Miskin Penerima	Total	Miskin	Total	ekstrem*	Miskin*	ekstrem
			(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)		
1	3203	Cianjur		17.89	54.73	19.23	229.08	318.43	18.48	186.78	17.58	137.51		
2	3204	Bandung		16.15	56.54	0.11	164.30	355.15	0.10	164.09	0.10	95.67		
3	3208	Kuningan		15.95	32.84	9.42	59.16	136.89	9.11	75.81	8.16	48.73		
4	3212	Indramayu		24.61	55.69	57.29	202.27	248.15	56.39	157.02	42.61	86.68		
5	3215	Karawang		20.23	41.43	21.51	161.84	256.00	20.75	140.51	18.77	98.15		
6	3302	Banyumas		29.98	55.27	56.56	182.28	239.47	53.57	128.85	43.93	89.85		
7	3304	Banjarnegara		16.71	34.60	22.56	79.40	119.86	20.51	69.53	18.37	53.64		
8	3305	Kebumen		20.29	47.71	24.32	118.73	175.80	22.47	107.51	19.42	73.09		
9	3327	Pemalang		9.52	124.27	24.54	16.02	209.03	42.09	155.75	186.55	72.71		
10	3329	Brebes		10.11	183.43	39.34	17.03	308.78	64.97	223.22	347.37	96.13		
11	3513	Probolinggo		9.33	109.44	24.67	18.61	218.35	51.78	224.95	255.89	85.10		
12	3522	Bojonegoro		17.39	41.78	6.01	53.33	178.54	5.13	104.10	4.80	73.01		
13	3524	Lamongan		7.37	87.62	20.30	13.85	164.68	39.32	55.36	148.92	63.29		
14	3526	Bangkalan		12.25	121.59	22.50	20.56	204.00	40.05	107.12	141.84	73.49		
15	3529	Sumenep		11.94	130.30	33.48	20.18	220.23	55.29	116.99	199.30	70.41		
16	5302	Sumba Timur		17.47	45.55	6.46	29.65	77.30	11.89	12.96	38.20	22.97		
17	5304	Timor Tengah Selatan		17.14	80.43	14.52	27.49	128.98	24.17	52.67	92.66	48.07		
18	5314	Rote Ndao		16.14	28.59	5.04	27.54	48.77	9.10	11.32	21.39	12.54		
19	5316	Sumba Tengah		20.47	15.06	2.08	34.49	25.37	3.83	6.23	12.56	7.28		
20	5319	Manggarai Timur		14.88	43.04	6.72	26.52	76.69	13.05	38.34	41.89	24.33		

Sumber: * Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

** SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

35 Wilayah Prioritas Tahun 2021 (2)

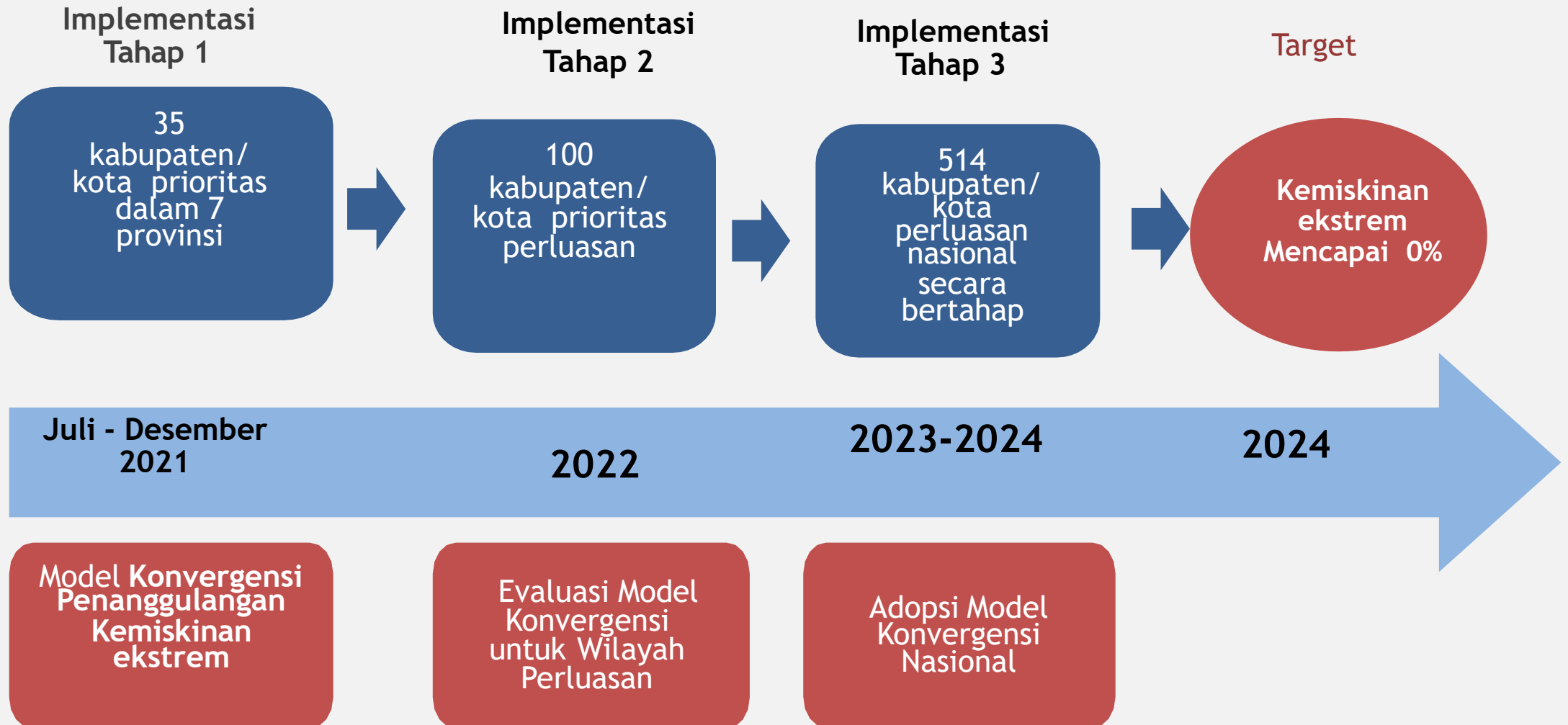
No	Kode Kab/ Kota	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menurut Susenas		Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**			Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial					
			Miskin Terbawah	Total	Miskin ekstrem	25% Penerima	ekstrem	Program Sembako		Program Keluarga Harapan		Miskin*	ekstrem
								Miskin Penerima	Total	Miskin	Total ekstrem*		
(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)				
21	8101	Maluku Tenggara Barat		18.46	20.92	3.07	27.11	30.74	4.67	8.69	13.60	7.85	
22	8102	Maluku Tenggara		12.82	12.83	1.88	22.57	22.59	3.59	3.56	13.85	6.52	
23	8103	Maluku Tengah		10.53	39.40	6.88	19.83	74.18	12.28	21.54	49.18	28.13	
24	8107	Seram Bagian Timur		12.13	14.05	2.24	23.04	26.69	4.24	4.33	15.18	8.61	
25	8108	Maluku Barat Daya		14.36	10.53	1.62	29.15	21.37	3.51	6.94	11.14	6.67	
26	9103	Teluk Wondama		24.08	7.96	1.01	30.91	10.22	1.47	2.23	3.34	1.29	
27	9104	Teluk Bintuni		20.79	13.59	2.31	29.39	19.22	3.35	3.15	6.59	2.81	
28	9109	Tambrau		22.44	3.14	0.63	32.80	4.59	0.90	1.77	3.06	0.13	
29	9110	Maybrat		22.89	9.52	1.57	30.78	12.80	2.00	3.28	4.44	2.28	
30	9111	Manokwari Selatan		20.97	5.15	0.98	28.88	7.09	1.37	3.54	4.91	3.23	
31	9402	Jayawijaya		30.84	67.72	15.67	37.22	81.71	19.44	13.97	41.62	2.45	
32	9411	Puncak Jaya		26.53	35.18	7.97	34.74	46.07	10.39	18.68	25.54	1.04	
33	9430	Lanny Jaya		30.52	54.92	13.72	38.13	68.62	17.60	35.00	35.23	2.77	
34	9431	Mamberamo Tengah		29.19	14.20	2.97	36.41	17.72	3.90	8.83	8.89	1.71	
35	9436	Deiyai		32.48	24.10	4.76	41.76	30.98	6.14	10.61	14.58	6.82	

Sumber: * Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

** SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

Keterangan: Arahan Presiden untuk fokus pada 5-7 provinsi, dengan 5 kabupaten per provinsi, dijadikan lokus untuk implementasi tahap awal

Rencana Kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



PROGRAM UNGGULAN YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MISI	PROGRAM UNGGULAN
MISI KE-1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi	1. GO - LAK = Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah "<i>ora antri, ora suwe, cepet dad'</i>".... 2. Satu Data Untuk Semua; Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan (500 KKS)

PROGRAM UNGGULAN YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MISI

MISI KE-2.
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

PROGRAM UNGGULAN

1. **SIS SUSANA**, Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim (3000 Siswa miskin SD dan SMP)
2. **BASUH**, Program Bapak Asuh Untuk Santri (1000 santri miskin)
3. **SIRUP**, Program insentif guru PAUD, TK, SD, SMP
4. **Penguatan Sekolah Inklusi (12 SD, 8 SMP)**
5. **BUMEN SEHATi**, Program peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen (pembangunan 1475 Unit Jamban, kelas ibu hamil dan balita , penurunan stunting, PMT dan Vitamin , Penanganan dampak Covid)
6. **SIBUSAH**, Program santri kebumen sehat dan berkah (konsultasi kesehatan dp ponpes, pendekatan pelayanan kes ke ponpes , SIM Ponpes di 4 ponpes
7. Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin (53.708 jiwa per September 2021)

PROGRAM UNGGULAN YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MISI	PROGRAM UNGGULAN
MISI KE-3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	1. KEBUMEN EKONOMI HANDAL, melalui Program "LAWET MUDA KREATIF" pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha 2. Program DESMELI (DESa MELeK Internet) 3. KAPOK PAK EKO, Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan (BUMDES, BUMDESMA) 4. ANDALAN PAS, Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi (5500 UMKM terdampak covid-19) 5. KUMPUL BAKUL, Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal. 6. TANI MULYO, Program Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pemenuhan Sarpras Pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen) 7. DEMEN MBUMEN, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa 8. Pengembangan potensi lokal perikanan darat (kampung sidat, kampung gabus, kampung lele dll), perikanan tangkap dan kampung garam , Bantuan ikan bagi 1500 KK/RTM (50 Desa)

PROGRAM UNGGULAN YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MISI	PROGRAM UNGGULAN
MISI KE-4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak) 2. Program BANYU MILI (Air Irigasi tersedia terus) 3. Nandur Wit nggo Anak Putu

MISI	PROGRAM UNGGULAN
MISI KE-5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat	1. TUPAT RUJI, Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji / TPQ 2. MESIN SERBU, Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen 3. MEN TAMBENG, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

TKPK SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM



Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrim di daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh OPD terkait termasuk swasta dengan melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Catatan: Political will dari kepala daerah sangat menentukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Menjadi **Coordination Hub** Penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tugas sebagai berikut:

1. Memastikan penanggulangan kemiskinan ekstrem **menjadi prioritas** pembangunan daerah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program daerah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
2. **Mensinergikan program** penanggulangan kemiskinan ekstrim dari Pemerintah Daerah dan Desa dengan program Kementerian/Lembaga untuk dapat diimplementasikan secara **konvergen** di tingkat desa dan menjangkau rumah tangga sasaran.
3. **Melibatkan unsur non-pemerintah** (Pihak Swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan unsur lainnya) dan memfasilitasi sumberdaya non-pemerintah (dana, inovasi dan lainnya) untuk dapat berperan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah
4. Bersama aparat kecamatan/desa, fasilitator lokal dan perguruan tinggi **melakukan monitoring** pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.



Terimakasih...